

**EVALUASI KESESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PASCA PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW) DI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOYOLALI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :

MILLENNIA DUTA RAMADHANA

NIT. 22314464

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

Regional expansion may accelerate land use change and influence its conformity with the Regional Spatial Plan (RTRW). This study aims to analyze post-expansion land use changes, evaluate the conformity of land use changes with the Boyolali Regency Spatial Plan, and identify the factors influencing land use incompatibility in Tamansari District. A quantitative method with a spatial approach was employed. The analysis utilized Geographic Information Systems (GIS) through Sentinel-2 image interpretation, overlay analysis, land use change analysis, and multiple linear regression. The results indicate that land use change was dominated by the conversion of dryland agriculture into shrubland (17.87%) and settlements (10.34%). Spatially, land development tends to cluster around existing settlements and extend linearly along major road corridors. The conformity evaluation revealed that 54.73% of land use changes were classified as conforming, 44.18% as partially conforming, and 1.09% as non-conforming with the RTRW. Multiple regression analysis showed that road proximity, settlement proximity, and public facility proximity jointly had a significant effect on land use incompatibility, while individually only road proximity was statistically significant. These findings are expected to provide input for spatial planning control and future evaluation of the RTRW in Tamansari District following regional expansion.

Keywords: Regional Expansion, Land Use Change, Regional Spatial Plan (RTRW), Land Use Conformity.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoritis	21
1. Pemekaran Wilayah	21
2. Penggunaan Tanah dan Perubahan Penggunaan Tanah	25
3. Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	29
4. Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	30
C. Kerangka Pemikiran	35
D. Pertanyaan Penelitian	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Format Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	42

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	45
D. Definisi Operasional Konsep dan Variabel	47
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	49
F. Analisis Data.....	52
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	61
A. Kondisi Geografis Kecamatan Tamansari	61
B. Kondisi Fisik Dasar Wilayah.....	65
C. Arahana Pola Ruang RTRW Kabupaten Boyolali di Kecamatan Tamansari	71
BAB V PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN TAMANSARI.....	74
A. Kondisi Penggunaan Tanah Tahun 2017 dan Tahun 2026.....	74
B. Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2017–2026.....	87
C. Pola Pengembangan Tanah.....	95
BAB VI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RTRW	101
A. Kesesuaian Penggunaan Tanah Tahun 2026 dengan Pola Ruang RTRW.....	101
B. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RTRW	102
C. Sebaran Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah terhadap RTRW	103
BAB VII FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RTRW	106
A. Pengaruh Kedekatan terhadap Jalan, Permukiman, dan Fasilitas Umum terhadap Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah.....	106
B. Faktor yang Paling Dominan Mempengaruhi Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah	109
C. Keterkaitan Pemekaran Wilayah dengan Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah terhadap RTRW	111
BAB VIII PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan wilayah di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan ruang untuk permukiman, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memberi kewenangan bagi daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan potensi masing-masing (Fadli dkk., 2025). Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah pemekaran wilayah administratif, yang bertujuan memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, dan mewujudkan pemerataan pembangunan (Al Arif & Karsa, 2022).

Proses pemekaran sering kali memunculkan tantangan baru dalam pengelolaan tata ruang dan kesesuaian penggunaan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Banyak daerah pasca pemekaran menghadapi ketidakseimbangan antara pertumbuhan fisik wilayah dan perencanaan spasial yang ada (Poma dkk., 2021). Dalam konteks perencanaan wilayah, RTRW berfungsi sebagai acuan strategis untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan (Savitri, 2022). Namun, pelaksanaan RTRW di banyak daerah belum berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan data spasial, serta tekanan pembangunan yang tinggi (Lubis dkk., 2021).

Tekanan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk telah mendorong alih fungsi lahan di berbagai daerah. Misalnya, penelitian oleh Praja dkk., (2024) menegaskan bahwa lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang menjadi salah satu penyebab utama menurunnya daya dukung lingkungan. Hal ini sejalan dengan hasil studi Dalilah dkk., (2021) di Kota Semarang yang menemukan adanya perubahan penggunaan tanah secara masif akibat pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Ketidaksesuaian tersebut dapat menyebabkan degradasi ekologis, banjir, dan penurunan kualitas lingkungan perkotaan.

Dalam konteks perencanaan spasial, evaluasi kesesuaian penggunaan tanah menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pengembangan wilayah dilakukan sesuai dengan kapasitas biofisik dan sosial ekonomi suatu daerah (Nathanael & Taryana, 2025). Penelitian Markasabana dkk., (2025) di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah hanya tergolong “sesuai marginal” untuk permukiman, menandakan perlunya kebijakan tata ruang yang lebih adaptif dan berbasis data geospasial. Sementara itu, penelitian Praja dkk., (2024) di Kabupaten Kolaka menemukan ketidaksesuaian antara fungsi kawasan dan pemanfaatan aktual tanah akibat lemahnya implementasi RTRW di tingkat daerah.

Aspek pemekaran wilayah juga menjadi perhatian penting dalam analisis kesesuaian penggunaan tanah. Studi Mardin dkk., (2025) di Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, menunjukkan bahwa pemekaran wilayah meningkatkan pelayanan publik namun belum diiringi penguatan aspek spasial. Fenomena serupa juga diungkap oleh Fadli dkk., (2025) di Kabupaten Batu Bara, di mana hasil analisis kelayakan pemekaran Kecamatan Medang Deras menunjukkan bahwa meskipun syarat administratif dan teknis telah terpenuhi, indikator kesesuaian dengan RTRW belum sepenuhnya memenuhi kriteria. Kondisi ini menggambarkan bahwa aspek tata ruang sering kali menjadi variabel paling lemah dalam proses pemekaran wilayah di Indonesia.

Dari perspektif kebijakan pembangunan, Suherman & Maryani, (2024) menyebut bahwa pemekaran wilayah sering dijadikan solusi untuk mengatasi ketimpangan spasial antarwilayah, namun tanpa pengendalian tata ruang yang baik, pemekaran justru berpotensi memperluas ketimpangan baru. Temuan ini diperkuat oleh Nugroho, (2025) yang dalam studi kelayakan pemekaran di Kabupaten Cilacap menekankan pentingnya evaluasi kesesuaian penggunaan tanah dan kesiapan infrastruktur sebelum pembentukan wilayah administratif baru.

Faktor lingkungan dan sosial juga menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan ruang. Kaswanto dkk., (2021) menjelaskan bahwa perubahan tutupan lahan di Kabupaten Labuhan Batu Utara selama satu dekade terakhir dipengaruhi oleh faktor internal seperti pertumbuhan penduduk dan ekonomi, serta faktor eksternal berupa kebijakan tata ruang yang belum efektif. Dengan demikian, perubahan struktur ruang akibat tekanan pembangunan dan kebijakan pemekaran perlu diimbangi dengan pendekatan berbasis kesesuaian penggunaan tanah agar keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Kondisi yang sama dapat ditemukan di berbagai daerah lain. Dje'o & Saputra, (2022) dalam penelitiannya di Kecamatan Pamona menunjukkan bahwa laju pembangunan pasca pemekaran wilayah berlangsung cepat, tetapi belum diimbangi dengan pengawasan tata ruang yang memadai. Akibatnya, terjadi tumpang tindih fungsi ruang dan ketidaksesuaian antara pemanfaatan aktual tanah dengan peruntukan dalam RTRW. Penelitian serupa oleh Poma dkk., (2021) juga menyoroti pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang berbasis pembangunan berkelanjutan untuk menghindari degradasi wilayah.

Dalam konteks Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali, pemekaran wilayah yang terjadi pada 2018 telah mendorong pertumbuhan fisik dan aktivitas ekonomi baru. Peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman, fasilitas publik, dan infrastruktur jalan telah menyebabkan perubahan signifikan dalam struktur penggunaan tanah. Secara geografis, Kecamatan Tamansari memiliki posisi strategis di bagian selatan Kabupaten

Boyolali, dengan kondisi topografi yang bervariasi dan sebagian wilayahnya merupakan kawasan lindung.

Berdasarkan Peta Risiko Bencana yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016, sebagian wilayah yang saat ini masuk dalam Kecamatan Tamansari termasuk dalam kategori rawan longsor tingkat tinggi, khususnya pada bagian zona lereng atas (wilayah hulu) yang memiliki kemiringan lereng relatif curam. Selain itu, wilayah hulu Kecamatan Tamansari juga termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) II Gunung Merapi, yaitu kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, serta gas beracun. KRB II dibedakan menjadi kawasan rawan awan panas, aliran lava, lahar, dan gas beracun terutama pada daerah hulu, serta kawasan rawan hujan abu lebat, lontaran batu pijar, dan hujan lumpur panas. Kondisi biofisik tersebut menunjukkan bahwa sebagian wilayah yang saat ini masuk dalam Kecamatan Tamansari memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi, sehingga pemanfaatan ruang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, berbasis mitigasi risiko, dan tetap menjaga fungsi lindung kawasan.

Terdapat indikasi bahwa sebagian tanah di wilayah ini telah dimanfaatkan tidak sesuai peruntukannya berdasarkan RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011–2031. Indikasi ini diperoleh melalui pra-analisis awal berupa telaah dokumen RTRW, serta observasi lapangan terbatas. Fenomena ketidaksesuaian penggunaan ruang terhadap rencana tata ruang sering kali berkorelasi dengan peningkatan risiko bencana, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian mengenai kesesuaian rencana pola ruang terhadap risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Boyolali, yang menemukan bahwa semakin dekat wilayah dengan lereng gunung Merapi dan Merbabu, semakin tinggi risiko tanah longsor yang ada dan pentingnya integrasi risiko bencana dalam perencanaan ruang (Aji dkk., 2024). Selain itu, studi (Nurhadi dkk., 2015) tentang bahaya erupsi dan longsor pada lembah antar gunungapi Merapi-Merbabu menegaskan perlunya perhatian terhadap karakteristik geologi dan potensi bahaya alam di wilayah lereng vulkanik semacam ini, yang relevan dengan konteks kawasan Tamansari. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal perencanaan ruang dan praktik pemanfaatan tanah di lapangan yang perlu dikaji secara sistematis dan berbasis analisis spasial.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kesesuaian penggunaan tanah dan dampak pemekaran wilayah di berbagai daerah, hingga saat ini belum ditemukan kajian yang secara spesifik mengevaluasi kesesuaian perubahan penggunaan tanah pasca pemekaran wilayah terhadap RTRW di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali, khususnya dalam konteks wilayah yang memiliki karakteristik biofisik dan tingkat kerentanan bencana yang relatif tinggi, sehingga diperlukan kajian yang lebih kontekstual dan berbasis kondisi lokal wilayah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul “Evaluasi Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah Pasca Pemekaran Wilayah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali” dipandang penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pengembangan tanah pasca pemekaran di Kecamatan Tamansari telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Boyolali serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian yang terjadi. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan masukan empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip tata ruang nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perubahan penggunaan tanah pasca pemekaran wilayah di Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana kesesuaian antara kondisi aktual penggunaan tanah dengan arahan peruntukan ruang dalam RTRW Kabupaten Boyolali di wilayah Kecamatan Tamansari?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW di Kecamatan Tamansari pasca pemekaran wilayah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menggambarkan perubahan penggunaan tanah pasca pemekaran wilayah di Kecamatan Tamansari;
2. Menganalisis tingkat kesesuaian antara penggunaan tanah aktual dengan arahan peruntukan ruang dalam RTRW Kabupaten Boyolali;
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW di Kecamatan Tamansari pasca pemekaran wilayah.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat secara akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu penataan ruang dan administrasi pertanahan, khususnya dalam kajian evaluasi kesesuaian

perubahan penggunaan tanah pasca pemekaran wilayah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai keterkaitan antara kebijakan pemekaran daerah dan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis RTRW, serta menjadi dasar pengembangan model evaluasi spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dapat diterapkan pada wilayah hasil pemekaran lainnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

2. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Tamansari dan sekitarnya mengenai pentingnya pemanfaatan tanah sesuai dengan fungsi kawasan dan arahan RTRW. Pemahaman ini dapat membantu masyarakat dan pelaku pembangunan menghindari dampak negatif dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali, seperti degradasi lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan tata ruang yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mengendalikan pemanfaatan ruang dan mengevaluasi kesesuaian penggunaan tanah di Kecamatan Tamansari pasca pemekaran wilayah. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan penataan ruang yang lebih efektif, penyempurnaan dokumen RTRW, perbaikan sistem perizinan pembangunan, serta penguatan strategi pengawasan penggunaan tanah agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi serta kelestarian lingkungan.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesesuaian pengembangan tanah pasca pemekaran wilayah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan penggunaan tanah pasca pemekaran wilayah di Kecamatan Tamansari menunjukkan adanya dinamika pemanfaatan ruang yang cukup tinggi. Perubahan terbesar terjadi dari penggunaan tanah tegalan/ladang menjadi semak sebesar 17,87%, diikuti perubahan tegalan/ladang menjadi kampung sebesar 10,34%. Perubahan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan berkurangnya intensitas pemanfaatan sebagian lahan pertanian, sekaligus berkembangnya kawasan permukiman setelah pemekaran wilayah. Berdasarkan analisis spasial, pola pengembangan tanah memperlihatkan kecenderungan perkembangan kawasan terbangun yang mengelompok (*clustered*) di sekitar permukiman yang telah berkembang serta memanjang (*linear*) mengikuti koridor jalan. Selain itu, pada beberapa bagian wilayah juga ditemukan kecenderungan penurunan intensitas pemanfaatan lahan yang ditandai dengan perubahan lahan pertanian menjadi semak, terutama pada wilayah dengan aksesibilitas rendah dan kondisi topografi yang relatif curam.
2. Hasil analisis kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW menunjukkan bahwa 2.325,96 hektar (54,73%) wilayah Kecamatan Tamansari termasuk kategori sesuai, 1.877,67 hektar (44,18%) termasuk kategori belum sesuai, dan 46,43 hektar (1,09%) termasuk kategori tidak sesuai. Dominannya kategori sesuai menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan tanah aktual telah selaras dengan arahan pola ruang RTRW Kabupaten Boyolali. Sementara itu, proporsi kategori belum sesuai yang masih cukup besar menunjukkan bahwa masih terdapat penggunaan tanah yang berpotensi diarahkan agar sesuai melalui pengendalian pemanfaatan ruang, rehabilitasi kawasan, dan penyesuaian fungsi penggunaan tanah sesuai ketentuan RTRW. Adapun kategori tidak sesuai hanya dijumpai pada sebagian kecil wilayah yang pemanfaatannya bertentangan dengan fungsi kawasan dalam RTRW sehingga memerlukan pengendalian yang lebih ketat.
3. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel kedekatan terhadap jalan, permukiman, dan fasilitas umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketidaksesuaian penggunaan tanah di Kecamatan Tamansari (Sig. < 0,05). Namun, berdasarkan uji parsial (uji t), hanya variabel kedekatan

terhadap jalan yang berpengaruh signifikan terhadap ketidaksesuaian penggunaan tanah, sedangkan variabel kedekatan terhadap permukiman dan fasilitas umum tidak berpengaruh signifikan. Nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,148$) menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 14,8% variasi ketidaksesuaian penggunaan tanah, sedangkan 85,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedekatan terhadap jalan merupakan faktor utama yang memengaruhi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan tanah pasca pemekaran wilayah di Kecamatan Tamansari, karena kemudahan akses mendorong perkembangan pemanfaatan ruang yang tidak selalu mengikuti arahan RTRW.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Boyolali disarankan untuk melakukan peninjauan kembali (*review*) dan penyempurnaan dokumen RTRW, khususnya terkait wilayah Kecamatan Tamansari yang merupakan kecamatan hasil pemekaran pada tahun 2018 dan belum tergambarkan secara administratif dalam RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011–2031. Penyesuaian tersebut diperlukan agar arahan pola ruang dapat mencerminkan kondisi administrasi dan perkembangan penggunaan tanah terkini, sehingga dapat menjadi dasar yang lebih efektif dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan perencanaan pembangunan wilayah.
2. Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kecamatan Tamansari perlu meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pada wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi dan berada di sekitar jaringan jalan utama karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kedekatan terhadap jalan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap ketidaksesuaian penggunaan tanah. Pengendalian dapat dilakukan melalui pengawasan pemanfaatan ruang, penegakan ketentuan zonasi, serta pemberian izin pemanfaatan ruang yang lebih selektif agar perkembangan wilayah tetap sesuai dengan arahan RTRW.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model analisis dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi ketidaksesuaian penggunaan tanah, seperti faktor ekonomi, nilai lahan, kepemilikan tanah, pertumbuhan penduduk, kebijakan pembangunan, maupun aspek kebencanaan. Penambahan variabel tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi ketidaksesuaian penggunaan tanah, mengingat model penelitian ini hanya mampu menjelaskan 14,8% variasi ketidaksesuaian penggunaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. B., Miladan, N., & Pujantiyo, B. S. (2024). Kesesuaian Rencana Pola Ruang Terhadap Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Boyolali. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 19(1). <https://doi.org/10.20961/Region.V19i1.66891>
- Al Arif, M. N. F., & Karsa, P. L. (2022). Pembentukan Kecamatan Di Kota Serang: Penguatan Otonomi Daerah Dan Good Governance Dalam Pelayanan Publik. *Perspektif*, 27(2), 104–114. <https://doi.org/10.30742/Perspektif.V27i2.827>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. In Jurnal Universitas Udayana. ISSN (Vol. 2302).
- Baja, S. (2012). *Perencanaan Tata Guna Lahan Dalam Pengembangan Wilayah*. In Pendekatan Spasial & Aplikasinya.
- Choiriyyah, N., Purba, A., & Widyawati, R. (2023). Identifikasi Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan Pada Kawasan Sempadan Situ Terhadap Rencana Tata Ruang. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 3(2). <https://doi.org/10.23960/Snip.V3i2.527>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.
- Dalilah, A., Malinda, A. R., Oktapiyansyah, R., Monicha, W., & Purnama, F. (2021). Monitoring Perubahan Penggunaan Lahan Menggunakan Citra SPOT 6 Dan SPOT 7 Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(1), 99–108.
- Djaenudin, D., H., M., H., S., & Hidayat, A. (2011). Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan Untuk Komoditas Pertanian. In *Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan Untuk Komoditas Pertanian*.
- Dje'o, C., & Saputra, I. A. (2022). Kecepatan Pembangunan Daerah Baru Pasca Pemekaran Wilayah (Kasus Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso). *Jurnal Gawalise Geografi, Wilayah, Lingkungan, Dan Pesisir*, 1(1).
- Fadli, A., Harmain, U., & Nainggolan, P. (2025). Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Regional Planning*, 7(1), 38–48.
- Heryana, A. (2015). *Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Variabel Penelitian, Dan Hipotesis Penelitian (Dalam Penelitian Kuantitatif)*. Metodologi Penelitian.
- Kambau, A. M. C., Munarka, A. H., & Ismail, I. R. (2024). Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. *Journal Of Economic And Social Science*, 1(1), 11–21.
- Kaswanto, R. L., Aurora, R. M., Yusri, D., & Sjaf, S. (2021). Analisis Faktor Pendorong Perubahan Tutupan Lahan Selama Satu Dekade Di Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(1). <https://doi.org/10.14710/Jil.19.1.107-116>
- Lubis, A. D., Arismawati, N., & Hidayat, W. P. (2021). Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu (Studi Kasus: Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa, Dan Kecamatan Pagelaran). *Jurnal Pertanahan*, 11(2).
- Mardin, H. E., Yohanes, S., & Rema, A. D. (2025). Implikasi Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur. *Journal Of Administrative And Social Science*, 6(2), 192–202.

- Markasabana, F. J. P., Ningrum, E., & Himayah, S. (2025). Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Permukiman Di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Sains Geografi*, 3(1), 63–74.
- Nathanael, C., & Taryana, D. (2025). Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang 2022 Di Kecamatan Pulo Gadung. *Tunas Agraria*, 8(2), 159–175.
- Nugroho, S. (2025). Kelayakan Pemekaran Kabupaten Cilacap: Kajian Teoritis, Potensi Dan Tantangan Pemekaran Menjadi Tiga Daerah Otonom Baru (Dob). *Jurnal Kolaborasi Politik Karya*, 1(3), 13–23.
- Nurhadi, N., Ashari, A., & Suparmini, S. (2015). Kajian Bahaya Erupsi Dan Longsor Pada Lembah Antar Gunungapi Merapi-Merbabu Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Saintek*, 20(1). <https://doi.org/10.21831/Jps.V20i1.5606>
- Perkasa, D., Istiqomah, D. A., & Aisiyah, N. (2022). Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. *Widya Bhumi*, 2(2). <https://doi.org/10.31292/Wb.V2i2.27>
- Poma, M. D., Arsana, I. K. S., Laki, L., & Sahabi, A. (2021). Dampak Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(4).
- Praja, S. E., Nurhidayat, M., Burhanuddin, F., & Rumata, N. A. (2024). Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Dengan Fungsi Kawasan Di Kabupaten Kolaka. *Journal Of Green Complex Engineering*, 2(1), 01–08.
- Sabhuana, K. A., Sukamara, I. N., & Kardinal, Ni. G. A. D. A. (2021). Pola Pemekaran Kekotaan Akibat Perkembangan Morfologi di Daerah Pinggiran Kota Pada Koridor Jalan Raya Batubulan, Gianyar Bali. *Pranatacara Bhumandala: Jurnal Riset Planologi*, 2(2). https://doi.org/10.32795/Pranatacara_Bhumandala.V2i2.2232
- Savitri, R. (2022). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Planokrisna*.
- Savitri, R., & Belqis, D. A. (2021). Evaluasi Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. In *Jurnal Ilmiah Planokrisna*.
- Suherman, A., & Maryani, E. (2024). Pemekaran Wilayah Sebagai Solusi Ketimpangan Ruang Di Kabupaten Bekasi: Studi Literatur. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 9.
- Tambunan, A. A., Anazmi, F., & Tabuni, L. (2025). Analisis Kesesuaian Pola Ruang Dengan Potensi Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Mempawah. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 4.
- Wiguno, D. P. (2017). *Sistem Informasi Geografi Dan Penginderaan Jauh (Studi Kasus Analisis Keruangan Menggunakan Arcgis Dan Envi)* (1st Ed.). Deepublish.
- Yuliasri, A. (2017). Identifikasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Studi Kasus: Kecamatan Bogor Utara). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 1(1).

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro